



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 700/24/1/2022

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan, maka perlu disusun Pedoman Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Program Kerja pada Diktum KESATU didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 Januari 2022

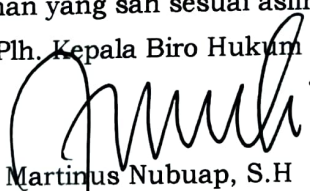
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

✶ Pih. Kepala Biro Hukum


Martinus Nubuap, S.H
Pembina

NIP. 19770501 200412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat:
2. Pimpinan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

No	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	JUMLAH HP					JUMLAH SDM			JM L TIM	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					PJ	WK	DL	KT	AT	PJ	WK	DL							KT	AT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)								
20	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
21	Kearsifan dan Perpustakaan																			
22	BPSDM																			
23	Penghubung																			
24	Biro Perencanaan																			
25	Biro Pengadaan Barang/jasa																			
26	Biro Hukum																			
C PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)																				
1	OPD Provinsi PB	Menilai Keperluan terhadap Peraturan	Program Kegiatan		7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	28	744,800,000.00	28	Laptop, ATK, Printer	Rendah	
D PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN																				
1	Seluruh OPD	Menilai ketepatan disiplin pegawai terhadap peraturan perundang-undangan	Daftar hadir pegawai periode 2021, dan semester I 2022	Januari, Agustus	7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	24	731,500,000.00	94	Laptop, ATK, Printer	Rendah	
E REVIU LKPD																				
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2021	Februari-Maret	15	15	15	30	30	1	1	1	1	15	2	188,100,000.00	1 LHP	Laptop, ATK, Printer	Tinggi	Reviu LK OPD dan Reviu LKPD
F REVIU RKPD																				
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Memperoleh keyakinan terbasas atas RKPD 2023 yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	RKPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023	April	15	15	15	30	30	1	1	1	1	12	1	82,650,000.00	1 LHP	Laptop, ATK, Printer	Sedang	
G EVALUASI SPIP																				

No	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	JL. MILAH HPP						JL. MILAH SDM						JM L. TTM	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Jumlah dan Prasaran	Tingkat Risiko	Keterangan
					PJ	WK	DL	KT	AT	PJ	WK	DL	KT	AT								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	Seluruh OPD	Membenahi kecukupan kepada pemangku kepentingan lain bahwa penyelenggaraan SPP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengimanan aset negara dan ketahanan terhadap peraturan perundangundangan	Penvelenggaraan SPP Instansi Pemerintah	Juli	7	7	7	14	14	1	1	1	1	1	3	16	234.080.000,00	17 LHE	Laptop, ATK, Printer	Sedang		
Seluruh OPD (kompleks)																						
H. RENCANA																						
1	Seluruh OPD (RKA Perubahan 2022)	Memperoleh kecukupan terhadap atas RKA-P OPD Tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	RKA-P OPD TA 2022	Agustus	15	15	15	30	30	1	1	1	1	12	1	82.650.000,00	1 LHP	Laptop, ATK, Printer	Tinggi			
2	Seluruh OPD (Tahun 2023)	Memperoleh kecukupan terhadap atas RKA OPD Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	RKA OPD TA 2023	Oktober	30	30	30	30	30	1	1	1	1	17	1	119.700.000,00	1 LHP	Laptop, ATK, Printer	Tinggi			
I. RENCANA PENERAPAN ANGGARAN DAN FDU																						
1	Seluruh OPD	Memperoleh kecukupan terhadap biaya pelaksanaan pengadaan barang jasa telah sesuai peraturan	Laporan Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Barang Jasa Tahun 2022	April, Juli, Oktober, Desember	7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	24	1.404.480.000,00	192	Laptop, ATK, printer	Sedang			
J. RENCANA DAK																						
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Membenahi kecukupan terhadap anggaran kemudian dari kebutuhan laporan realisasi penyelenggaraan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana Penyelenggaraan Dana Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	April, Juli, Oktober	7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	6	263.340.000,00	18	Laptop, ATK, printer	Tinggi			
2	Dinas Pendidikan																					
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan																					
4	Dinas Kesehatan																					
5	Dinas Pertambangan																					
6	Dinas Kelautan dan Perikanan																					

SELESAI

No	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	JUMLAH HIP				JUMLAH SDM				JM L TIM	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Jumlah dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					Pj	WK	DL	KT	AT	Pj	WK	DL							KT	AT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)		
K REVISI DANA OTSUS DAN DTI																				
1	Dinas Bina Marga	Membertikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan kesehatan laporan realisasi penyerapan dana	Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Otonomi Khusus	April, Juli, Oktober	7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	19	861,840,000.00	57	Laptop, ATK, printer	Tinggi	
2	Dians Cipta Karya	capaian output kegiatan Dana Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku																		
2	Dinas Pendidikan																			
3	Dinas Ketahanan Pangan																			
4	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan																			
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Sumber Daya Mineral																			
6	Dinas Perhubungan																			
7	Dinas Sosial																			
8	Dinas Kesehatan																			
9	Dinas Tanaman Pangan																			
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																			
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																			
13	Dinas Kelautan dan Perikanan																			
14	Sekretariat MRP																			
15	Dinas Pariwisata																			
16	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus																			
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																			
18	Biro Kesejahteraan Rakyat																			
19	Dinas Koperasi dan UKM																			
L EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP OPD																				
Seluruh OPD		Melakukan evaluasi atas LKjip OPD		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	Juni	3	3	3	10	10	1	1	1	1	3	24	247.000.000.00	48	Laptop, ATK, printer	Sedang

No	Area Penguasaan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	JUMLAH IHP						JUMLAH SDM			JM L TM	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Sasaran dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					PJ	WK	DL	KT	AT	PJ	WK	DL	KT							AT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)			(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	
M. REVU LKJIP PROVINSI																				
	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Melakukan evaluasi atas LKJIP Pemprov Papua Barat	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2021	Februari	15	15	15	30	30	1	1	1	1	1	8	1	59.850.000,00	1	Laprop. ATK, printer	Sedang
N. EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP KABUPATEN																				
	Kabupaten Maybrat	Melakukan evaluasi atas LKJIP Kabupaten Kota	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	Juli	1	-	7	7	7	1	-	1	1	3	4	244.432.000,00	4	Laprop. ATK, printer	Sedang	
	Kabupaten Raja Ampat																			
	Kabupaten Teluk Bintuni																			
	Kabupaten Serang Selesan																			
O. REVU LPPD PROVINSI																				
	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Melakukan revu atas LPPD Pemerintah Provinsi Papua Barat	LPPD Pemprov Papua barat Tahun 2021	Maret	21	21	21	21	21	1	-	1	1	4	1	27.930.000,00	1	Laprop. ATK, printer	Sedang	
P. PROBITY AL BMT																				
	10 Paket Pengadaan Pekerjaan pada OPD	Memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan kontrak dan Penyerahan	Oktober	7	7	7	14	14	1	1	1	1	3	10	146.300.000,00	10	Laprop. ATK, printer	Tinggi	
Q. PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI																				
	Seluruh komponen penilaian PMPRB	Melakukan verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	PMPRB OPD Tahun 2021	Juni	7	7	7	14	14	1	1	1	1	5	1	26.600.000,00	1	Laprop. ATK, printer	Sedang	

No	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah HP				Jumlah SDM				JM L	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Jumlah dan Prasaran	Tingkat Risiko	Keterangan
					WK Pj	DL Pj	KT	AT	WK Pj	DL Pj	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)								
R VERIFIKASI LHKPN																		
1	LHKPN Pemerintah Provinsi Papua Barat	Mantau kepatuhan pelaksanaan LHKPN	Data Wajib Laporan Pemprov Papua Barat	Januari-Desember											1 dok	Laptop, ATK, printer	Sedang	
S VERIFIKASI PELAKSANA RENCANA AKSI DAERAH, PENCEGAHAN, DAN PEMBERANTASAN KORUPSI																		
1	Rencana aksi kinerja daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemprov Papua Barat (STRANAS)	Mantau Pelaksanaan Rencana aksi kinerja Pencegahan dan Penanganan tindak pidana korupsi	Laporan pelaksanaan Renaksi Instansi Pemprov Papua Barat	Maret, Juni, September, Desember	5	5	0	7	7	1	1	0	1	3	1 dok	Laptop, ATK, printer	Sedang	
2	Renaksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemprov Papua Barat (MCP)	Mantau Pelaksanaan Renaksi Pencegahan dan Penanganan tindak pidana korupsi	Laporan pelaksanaan Renaksi Instansi Pemprov Papua Barat	Maret, Juni, September, Desember	5	5	0	7	7	1	1	0	1	3	1 dok	Laptop, ATK, printer	Sedang	
T PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH (KAB/KOTA)																		
1	Kabupaten Maybrat	Memperoleh keyakinan terhadap capaian RP/MD	Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum	Juni	10	0	10	10	10	1	0	1	1	4	4 LHP	Laptop, ATK, printer	Tinggi	
2	Kabupaten Tambrauw			Maret														
3	Kabupaten Sorong			Juni														
4	Kota Sorong			Mei														
U EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) KAB/KOTA																		
1	Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat	Melakukan evaluasi LPPD pemerintah Kabupaten/Kota	LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat	Mei	5	0	5	5	5	1	0	1	1	2	13 LHP	Laptop, ATK, printer	Sedang	
V MONITORING-TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT																		
1	Pendampingan BPK RI, Pemeriksaan LKPD, Kinerja	Mengkoordinasikan Hal-hal yang menyangkut pemeriksaan ke OPD Lingkup Pemerintah Provinsi	OPD Pemprov	Januari, Maret	15	-	-	30	30	1	-	-	1	4	4	915,800,000.00	20 Dok Laptop, ATK, printer	Sedang
2	Pendampingan Irjen	Mengkoordinasikan Hal-hal yang menyangkut pemeriksaan ke OPD Lingkup Pemerintah Provinsi	OPD Pemprov	Mei, Oktober	15	-	-	30	30	1	-	-	1	4	4			

No	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal Pelaksanaan	JUMLAH HP					JUMLAH SDM					JML TTM	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan	Serana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					Pj	WK Pj	DL	KT	AT	Pj	WK Pj	DL	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
3	Pendampingan BPKP	Mengkoordinasikan Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan ke OPD Lingkup PemProv	OPD Pemprov	Mei, Oktober	14	-	-	25	25	1	-	-	1	4	4					
4	Tindak Lanjut Pemeriksaan (BPK, Egen, BPKP)	Pemeclesaian Temuan	OPD Pemprov	Januari s/d Desember	7	-	-	20	20	1	-	-	1	4	16					
5	Tindak lanjut Pemeriksaan (Inspektoral)	Pemeclesaian Temuan	OPD Pemprov	Januari s/d Desember	7	-	-	14	14	1	-	-	1	4	16					

GOVERNOR PAPUA BARAT,

CAPT/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Pih. Kepala Biro Hukum

Martinus Nubup, S.H

Pembina

NIP. 19770501 200412 1 001